

UPAYA JAMAICA FORUM FOR LESBIANS, ALL-SEXUALS, AND GAYS (J-FLAG) DALAM MELAWAN HOMOPHOBIA DI JAMAICA

Oleh :
Nurul Hidayah
Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research explains about how the efforts Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals, and Gays in against homophobia in Jamaica. J-FLAG is the foremost organisation in Jamaica advocating for the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. Jamaica has a rich history of human rights advocacy for the LGBT community. The movement began in the 1970s with the Gay Freedom Movement, spearheaded by Larry Chang who also later cofounded J-FLAG with several others. In those days, more pockets of tolerance and gay social spaces existed.

Jamaica's anti-sodomy or "buggery" laws that prohibit same-sex conduct between consenting adult males date to 1864 when Jamaica was a British colony. Sections 76, 77 and 79 of the Offences Against the Person Act make the abominable crime of buggery.

Prosecutions under these laws are rarely pursued. Nevertheless the laws have a real and negative impact. Criminalizing sexual intimacy between men offers legal sanction to discrimination against sexual and gender minorities, and in a context of widespread homophobia, gives social sanction to prejudice and helps to create a context in which hostility and violence is directed against LGBT people.

Key Words: J-FLAG, Homophobia, LGBT, Buggery

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak atas perlindungan hukum dari tindak kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam hak untuk memilih jati dirinya. *Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)* merupakan *issue* yang paling intens karena menyinggung masalah gender dan HAM. *Issue* kelompok penyuka sesama jenis dan *transgender* tersebut telah berhembus

sejak lama dan pada tahun 2011 PBB mengeluarkan resolusi tentang LGBT yang menyebutkan bahwa kelompok LGBT dipandang sebagai hak asasi manusia yang patut dilindungi.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum homoseksual dan transgender menjadi alasan dikeluarkannya resolusi tersebut. Sebelumnya, LGBT dikategorikan sebagai penyandang cacat mental. Namun, pada tahun 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan

resolusi yang mendukung penghapusan LGBT dari kategori penyandang cacat mental. Meskipun, kelompok LGBT tidak lagi dikategorikan sebagai penyandang cacat mental, tapi kelompok LGBT masih belum bisa diakui dan diterima dikalangan masyarakat, karena bertentangan dengan moral dan agama.¹

Homophobia didasari karena ketidaktahuan dan kekurangtahuan masyarakat ditambah dengan stigma negatif dan resistensi moral dari norma dan agama, sehingga pasangan homoseksual tidak diterima dengan baik dan tidak nyaman apabila orientasi seksual mereka diketahui oleh publik. Homophobia adalah ketakutan berada dekat dengan homoseksual.

Jamaika merupakan negara yang berada di Laut Karibia, Amerika Latin. Negara Jamaika memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia dan kriminalisasi merajalela terhadap kelompok homoseksual, hal ini mendorong aktivis-aktivis dan kelompok-kelompok HAM menyebut Jamaika sebagai "*The Most Homophobic Place on Earth*".² Homophobia di Jamaika bermacam-macam, yang lebih menakutkan adalah dibunuh oleh masyarakat dan dimutilasi seperti yang terjadi pada aktivis LGBT yaitu Brian Williamson di Kingston. Setelah kematian Brian, kelompok homoseksual semakin merasakan

ketakutan. *Jamaica Observer* menerbitkan surat yang berbunyi "*To be gay in Jamaica is to be dead*".³

Jamaica Forum for Lesbians, All Sexuals, and Gays (J-FLAG) merupakan sebuah organisasi nasional yang menyuarakan pentingnya pengakuan atas kelompok LGBT. J-FLAG didirikan pada tahun 1998 oleh 12 orang yang terdiri dari berbagai bidang dan merupakan organisasi bagi kelompok LGBT pertama di Jamaika. Tujuan dibentuknya J-FLAG adalah menciptakan masyarakat Jamaika yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta mertabat semua individu terlepas dari orientasi seksual dan identitas gender mereka. Selain menjadi pusat pelayanan bagi kelompok LGBT, perannya yang paling diutamakan adalah memperjuangkan hak bagi kelompok homoseksual dan berupaya agar parlemen menghapus undang-undang *The Offences Against the Person of Act of 1864 (OAPA)* dan melegalkan undang-undang untuk melindungi kelompok LGBT.⁴

Oleh karena itu dengan adanya tekanan dari dalam diri maupun lingkungan dan segala permasalahan yang dialami kaum *gay* peneliti merasa tertarik untuk meneliti hambatan dan tantangan J-FLAG dalam melawan homophobia di Jamaika.

¹ Ariyanto dan Rido Triawan. *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI*, (Jakarta: Arus Pelangi & Yayasan Tifa, 2008) hal 22-23

² Tim Padgett. *The Most Homophobic Place on Earth?*, diakses dari <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1182991,00.html> Pada tanggal 05 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB

³ Diana Taylor. *'If you're gay in Jamaica, you're dead'*. Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2004/aug/02/gayrights.gender> pada tanggal 05 Agustus 2014 pukul 10:00 WIB

⁴ J-FLAG. *Jamaican LGBT Guide on Human Rights, Sexuality & Gender*. Diakses dari <http://jflag.org/wp-content/uploads/2013/11/J-FLAG-FAQs-on-Human-Sexuality-and-Gender.pdf> pada tanggal 25 September 2014 pukul 8:46 WIB

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa latar belakang atau penyebab munculnya J-FLAG sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak homoseksual di Jamaika, Menjelaskan upaya yang dilakukan J-FLAG dalam melawan homophobia di Jamaika dan Menjelaskan hambatan dan tantangan J-FLAG dalam melawan homophobia di Jamaika.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Selanjutnya peneliti mengharapkan penelitian ini juga mampu mengilhami para peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi kasus-kasus yang berkaitan dan serupa yang belum tercakup dalam penelitian ini, sehingga terjadi pengembangan wacana yang akan menambah ilmu pengetahuan.

2.1 Sejarah Homoseksual dalam Peradaban Klasik

2.1.1 Homoseksual dalam Peradaban Yunani Kuno

Sejumlah cerita pada Masa Yunani kuno berkisah tentang penculikan dan cinta seorang pemuda. Homoseksual pada masa Yunani kuno terjadi ketika seorang lelaki muda yang belajar kepada lelaki tua (guru) yang dijadikan teladan. Mitos yang berkembang dalam hal ini sudah menjadi hal yang cukup sering terjadi dimana adanya suatu penculikan (mengambil) dan perjalanan keluar kota atau perjalan ke hutan untuk belajar mengenai pengetahuan tentang kehidupan kepada lelaki remaja tersebut yang juga dibumbui dengan hubungan seks, sebelum akhirnya menjadi seorang prajurit dewasa.

Masyarakat Creta telah lama mengenal pemujaan terhadap prostitusi maskulinitas yang disebut perjantanan Creta. Perjantanan Creta melibatkan ritual penculikan anak-anak oleh laki-laki dewasa dari kelas aritokrat dengan persetujuan oleh ayah anak tersebut. Kekasih laki-laki dewasa disebut *Erastes* dan kekasih anak-anak (*eromenos*) yang diambil dan diajak ke hutan-hutan, dimana mereka menghabiskan waktu selama 2 bulan untuk berburu dan berpesta dengan teman-temannya. Kemudian, setelah menjalaninya selama 2 bulan, ia akan mengubah gelarnya menjadi *Parastates*.⁵ Sesuai dengan adat istiadat masyarakat Creta, anak laki-laki yang biasanya diambil oleh laki-laki dewasa adalah yang paling berani dan pandai, bukan anak laki-laki yang tampan. Jika anak tersebut tidak mempunyai kekasih laki-laknya dan tidak menjadi objek penculikan sama sekali, maka keluarganya akan diiputi rasa malu terhadap masyarakat. Pasangan homoseksual dalam mitologi Yunani yang paling terkenal adalah Ganymede dan Zeus, Apollon yang menarik perhatian pemuda-pemuda tampan seperti Cyparisse, Admete, Hymenee, Carnus dan lain-lain. Selain itu juga Dionysos yang pernah menculik Adonis (Spencer. 2004; 19).

2.1.2 Homoseksual dalam Peradaban Romawi Kuno

Nilai-nilai etis kuno tidak biasanya didasarkan pada norma-norma agama saja, yang hanya menunjukkan ritual maupun otoritas yang tepat. Kekuatan moral kurang lebih moral kurang lebih mengikat mereka didasarkan pada konsensus sosial yang menyebabkan rasa kehormatan atau malu, dampak psikologis yang sangat

⁵http://en.wikipedia.org/wiki/Cretan_pederasty

kuat dimasyarakat klasik. Pada masa Romawi Kuno, budaya, lingkungan, politik dan keluarga menimbulkan sikap yang berbeda terhadap hubungan homoseksual. Dalam tradisi Romawi Kuno, tujuan pendidikan adalah untuk melatih masyarakat yang benar-benar jantan, jantan dalam hal seks dan juga mendominasi dan tidak didominasi. “Kejantanan” merupakan benda yang paling penting bagi laki-laki karena menjadikan lambang kekuatan dan dominasi sebagai penakluk. Pemuda Romawi dididik untuk menguasai dunia dan tidak terlihat lemah karena ia adalah seorang prajurit. Seksualitas pada masa itu merupakan bentuk pelanggaran hukum pemerkosaan.⁶ Oleh karena itu, kerajaan Romawi melarang perbuatan homoseks apabila mereka melakukan peran seksual pasif (yang dipenetrasi) melalui berbagai undang-undang.

Anak laki-laki dilindungi oleh hukum dari tindak “dirayu”. Hukum pada masa itu bebas menghukum hubungan homoseks dengan anak laki-laki, meskipun anak tersebut setuju (*stuprum cum puero*). Berbeda dengan budak, mereka orang-orang yang tidak dipertimbangkan oleh masyarakat dan juga hukum. Pelacur laki-laki dan wanita juga dibatasi, serta hubungan seksual dengan seorang anak lelaki yang bukan budak akan didenda (*Lex Scantinia*).⁷

2.1.3 Homoseksual Pada Abad Renaisans di Inggris

Abad Renaisans dimulai pada abad ke 14 sampai abad ke 17, dimulai

di Italia pada abad pertengahan akhir hingga menyebar keseluruh wilayah Eropa.⁸ Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin “*renaitre*” yang berarti “hidup kembali” atau “lahir kembali”. Abad *renaissance* merupakan kelahiran kembali budaya klasik terutama budaya Yunani kuno dan Romawi kuno. Konsep Renaissance adalah menghargai tubuh dan manusia dapat hidup bebas menentukan jalan hidupnya tanpa terikat oleh doktrin gereja.

Pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I (7 September 1533 – 24 Maret 1603), menurut Alan Bray (1990) masyarakat belum memiliki gagasan yang jelas mengenai kelompok minoritas homoseksual, meskipun begitu homoseksual dipandang “horror” atau hal yang menakutkan. Pada prinsipnya, sodomi merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapaun, seperti pembunuhan dan penghujat. Istilah *Ganymede*, *Bugger*, dan *Catamite* adalah beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada homoseksual dan istilah yang paling banyak digunakan masyarakat adalah “*sodomite*” atau sodomi.

HOMOPHOBIA DI JAMAICA DAN MUNCULNYA J-FLAG (JAMAICA FORUM FOR LESBIAN, ALL SEXUALS, AND GAY)

3.1 Homoseksualitas di Jamaika

Hukum mengenai seksualitas merupakan bagian dari sejarah kolonial. Saat itu, akhir abad ke-19 bahwa permusuhan langsung terhadap tindakan homoseksual menjadi umum, khususnya pada masa pemerintahan Victoria. Kecemasan terhadap homoseksualitas dipicu oleh kekhawatiran menurunnya nilai kelas menengah dan dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Inggris.

⁶ Collin Spencer. Sejarah Homoseksualitas: dari Zaman Kuno Hingga Sekarang. (Bantul: Kreasi Wacana, 2011) hal 71

⁷ Angelo Di Berardino. Christian Anthropology And Homosexuality- 2 Homosexuality In Classical Antiquity. Diakses dari <<http://www.ewtn.com/library/humanity/hom o2.htm>>

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Renaisans

Akar homophobia di Jamaika memiliki banyak sulur, salah satunya dari sejarah Jamaika yang pernah dijajah oleh Inggris. Hukum Inggris memiliki pengaruh yang besar terhadap undang-undang di Jamaika. Inggris memiliki sejarah panjang mengutuk keberadaan seks antar laki-laki. Seks antar laki-laki di Inggris merupakan hal yang ilegal pada abad ke-16.

Menurut laporan *The United Nations Development Programme* (UNDP) yang merupakan jaringan pembangunan global PBB pada tahun 2012 bahwa kejahatan dan kekerasan merupakan masalah utama di Jamaika dan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, seperti wanita, anak-anak dan kaum miskin yang menjadi target kekerasan di Jamaika. Selain itu, kelompok LGBT yang berisiko mengalami viktimisasi dan kekerasan sebagai akibat dari orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender.

Menurut Gutzmore (2004, dalam Gaskins, 2013) berpendapat bahwa homophobia di Jamaika didukung oleh 5 imperatif ideologis atau disebut dengan “*homophobic ideological imperatives*” yang dibagi menjadi imperatif primer dan sekunder. *Pertama*, imperatif primer fundamentalis agama yang anti-homoseksualitas. Gutzmore menunjukkan bahwa fundamentalis agama menggunakan Alkitab untuk mengancam kaum homoseksual dengan memperlihatkan fakta-fakta yang tercantum didalam Alkitab menyatakan homoseksualitas merupakan bentuk kekejian. Mayoritas masyarakat Jamaika menganut agama Kristen, sehingga bagi mereka homoseksual sama saja dengan penyimpangan dari ajaran-ajaran dan orang-orang yang melakukan dosa ini harus dihukum oleh Tuhan.

Kedua, imperatif primer, yaitu homoseksualitas “tidak wajar”. Persepsi ini juga populer dikalangan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa dasar dari hubungan seks adalah bertujuan untuk menghasilkan keturunan, tetapi hubungan seks sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan dan merupakan cara yang sesat. Menurut Chavannes (2004, dalam Ian Boxill, dkk, 2011) laki-laki muda dianjurkan untuk melakukan hubungan seks heteroseksual untuk mengembangkan rasa maskulinitas. Perspektif lainnya adalah homoseksualitas dan pedofilia, dimana para pedofil menargetkan anak-anak dibawah umur yang tidak berdosa dan tidak berdaya untuk kepuasan seksualnya, baik dengan anak laki-laki maupun anak perempuan (Gutzmore, 2004).

Ketiga, imperatif sekunder kemurnian dan keaslian premordial homoseksualitas – globalisasi budaya bebas Afrika. King (2006, dalam Ian Boxill, dkk, 2011) memperluas persepsi homoseksualitas sebagai bagian dari konflik rasial. Anderson dan Gutzmore juga mencantumkan bahwa homoseksualitas sebagai imperialisme budaya. Dalam penelitiannya mengenai homophobia di Jamaika, Gutzmore menemukan bahwa homoseksualitas merupakan penyimpangan orang-orang kulit putih yang telah dikenakan kepada orang-orang Afrika yang datang berulang-ulang kali.

Keempat, Imperatif sekunder keharusan untuk melindungi anak-anak muda yang rentan menjadi target homoseksual, hal ini berkaitan dengan pedofilia. Para pedofil lebih menyukai anak-anak sebagai pemuas nafsu seksualnya, baik dengan anak laki-laki ataupun dengan anak perempuan.

Kelima, imperatif dari ilegalitas homoseksual. Keberadaan hukum anti-sodomi menciptakan kelas

pidana bagi kelompok *gay* dan *lesbian*. Akibatnya, mereka menjadi sasaran tindak kekerasan, pelecehan dan diskriminasi karena status kriminal kelompok homoseksual. Jamaika masih menerapkan *Buggery law* sama seperti yang aslinya dari hukum Inggris 1861.

Di Jamaika, homoseksual dikenal dengan sebutan "*batty man*" atau "*chi chi man*". *Batty man* atau *chi chi man* adalah istilah yang mengacu pada merendahkan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, seperti anal seks yang dipandang sebagai tindakan tersebut.⁹

Pada tanggal 9 Juni 2004, Brian Williamson, aktivis hak-hak *gay* terkemuka di Jamaika, dibunuh di rumahnya, tubuhnya dimutilasi dan beberapa luka benda tajam. Dalam waktu satu jam setelah tubuhnya ditemukan, seorang peneliti *Human Rights Watch* menyaksikan kerumunan berkumpul di luar TKP. Seorang pria tersenyum berseru, "*Battyman terbunuh!*". Beberapa orang lain merayakan pembunuhan Williamson, tertawa dan berteriak. Kemudian menyanyikan lagu "*Boom Bye Bye*", merupakan lagu dari Buju Banton yang berkisah tentang membunuh dan membakar orang-orang *gay*.¹⁰

Lingkungan sosial budaya dan hukum telah memberikan kontribusi terhadap prevalensi diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap LGBT Jamaika selama bertahun-tahun. Insiden ini meliputi, antara lain, pembunuhan, pengusiran paksa, pemukulan, dan serangan massa. Ancaman kekerasan menyebabkan banyak LGBT Jamaika hidup dalam ketakutan yang diidentifikasi sebagai kelompok non-heteroseksual atau homoseksual. Oleh

karena itu, banyak LGBT di Jamaika yang merahasiakan identitas seksual, identitas gender dan ekspresi *gender* merasa tidak berdaya. Akibatnya sulit bagi kelompok LGBT untuk hidup di Jamaika karena diberi status rendah dibandingkan dengan kelompok heteroseksual.

3.2 Bentuk Homophobia Di Jamaika

Menurut J-FLAG, homophobia adalah ketakutan irasional, jijik, kebencian kepada kaum *gay*, *lesbian*, dan biseksual dan ideologi sosial yang membuat perspektif mengintimidasi homoseksual. Hal ini mengacu kepada ketidaknyamanan terhadap perilaku, keyakinan atau sikap yang tidak sesuai dengan stereotip peran seks tradisional yang dapat menyebabkan ekspresi permusuhan atau bahkan kekerasan terhadap kelompok LGBT. Homophobia tidak terbatas pada satu kelompok atau segmen masyarakat. Sebagai konsekuensi, salah satu jenis insiden *homophobic* yang lebih mungkin menjadi umum di antara yang berbeda segmen, terlepas dari bagaimana mereka dikategorikan oleh ras, etnis, agama, kelas, atau status sosial-ekonomi. Seseorang dikatakan *homophobic* apabila ia menyatakan permusuhan atau bermusuhan dan atau menghasut kekerasan atau melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap *gay*, *lesbian*, *biseksual* atau *transgender*.¹¹

Menurut Boxill (2011, dalam J-FLAG, 2014) menemukan bahwa pada tahun 2011 Survey Nasional Sikap dan Persepsi Jamaika umumnya *homophobic* dan kaum LGBT lebih rentan mengalami kekerasan. Ditemukan bahwa sikap *anti-gay* dan

⁹ Human Rights Watch, Vol. 16, No. 6

¹⁰ Jamaica – Tourist Advisory. Diakses dari <http://www.jamaicancaves.org/boom-bye-bye-lyrics.html>

¹¹ J-FLAG. Jamaican LGBT Guide on Human Rights, Sexuality & Gender. (Kingston: J-FLAG, 2014) hal. 5-6

pandangan yang paling umum diantaranya orang-orang yang berpenghasilan rendah dan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan.

3.2.1 Penyerangan terhadap Kelompok Homoseksual

Serangan fisik maupun verbal terhadap individu LGBT kerap terjadi di Jamaika, kasus insiden penyerangan yang paling mencolok yaitu kasus pembunuhan Brian Williamson yang terjadi pada bulan Juni 2004 dan kasus pembunuhan Steve Harvey pada bulan November 2005.

3.2.2 Diskriminasi dalam Musik (Reggae/Dance Hall)

Dancehall juga disebut sebagai “murder music” karena beberapa liriknya mengandung tentang kekerasan dan *anti-gay*. Beberapa seniman Reggae telah dikritik karena lirik lagunya yang mengandung ajakan untuk membenci homoseksual (homophobia). *Murder music* memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat Jamaika untuk menghasut kekerasan terhadap homoseksual karena bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan kelas sosial ekonomi rendah, musik *dancehall* adalah hidup mereka. Oleh sebab itu, untuk menghentikan aliran musik tersebut, berbagai aktivis LGBT membentuk sebuah kampanye yang disebut “Stop Murder Music”. Kampanye *Stop Murder Music* adalah gerakan internasional oleh aktivis-aktivis di hampir setiap benua, yang mendesak sponsor untuk menarik dana dari seniman tersebut, mendesak untuk tidak menjual buku-buku mereka, dan mengatur pemboikotan dan protes saat seniman-seniman *murder music* melakukan *show*.¹²

¹²Leah Nelson. Harmonies of hate promote violence against gays to millions in the United States and elsewhere. diakses dari <https://www.splcenter.org/fighting->

3.2.3 Diskriminasi Dalam Politik

4 Selama pemilu 2001, Partai Buruh Jamaika (partai oposisi utama) mengadopsi “*chi chi man*” sebagai yel-yel kampanye mereka. *Chi Chi Man* merupakan istilah untuk merendahkan seorang laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. *Chi Chi Man* adalah lagu yang dinyanyikan oleh T.O.K. lagu tersebut sangat kontroversial karena mempromosikan pembunuhan terhadap gay.¹³

3.3 Munculnya J-FLAG (Jamaica Forum for Lesbians, All Sexuals, and Gays)

Penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi keintiman *same-sex* berdasarkan konsensual atau kegiatan lainnya yang menjadi bahan bakar stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang LGBT. Hal ini mendorong komunitas LGBT bawah tanah dan jauh dari hukum, kesehatan, sosial perlindungan atau kesejahteraan, dan jasa lainnya dari aktor negara dan non-negara untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar diakui oleh masyarakat nasional maupun internasional.

Jamaica Forum for Lesbian, All-Sexuals and Gays (J-FLAG) didirikan pada tahun 1998 sebagai organisasi hak asasi manusia yang didedikasikan untuk pelayanan kebutuhan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) orang di Jamaika. Organisasi ini beroperasi jauh lebih dalam mode LSM hak asasi manusia tradisional, dan terutama ditujukan untuk menebus diskriminasi hukum dan sosial terhadap kelompok minoritas

hate/intelligence-report/2015/jamaicas-anti-gay-murder-music-carries-violent-message

¹³Homophobia in Jamaica and its role in driving the HIV/AIDS epidemic. Diakses dari <http://www.hrw.org/reports/2004/jamaica1104/6.htm>

seksual. Munculnya J-FLAG diantar dalam gelombang baru advokasi, yang menekankan keterlibatan politik formal pada lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, advokasi lebih tegas terfokus pada bidang hukum dan khususnya pada lingkup dan jangkauan perlindungan konstitusional bagi kelompok minoritas.

J-FLAG didirikan oleh 12 orang dari berbagai bidang. Belum ada data resmi mengenai keanggotaan J-FLAG dan J-FLAG membuka sukarelawan bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam memperjuangkan hak-hak LGBT di Jamaika. Misi J-FLAG adalah berusaha untuk mengubah konstitusi Jamaika dan memasukkan orientasi seksual dalam klausul non diskriminasi. J-FLAG bekerja untuk mendorong penerimaan dan pengayaan kehidupan kelompok LGBT menjadi bagian integral masyarakat.¹⁴ J-FLAG menyediakan layanan bagi LGBT, meliputi:

- a. Pengembangan pribadi dan membangun hubungan masyarakat di komunitas gay.
- b. Konseling dan rujukan pelayanan kepada para gay dan keluarga mereka.
- c. Konsultasi dan kolaborasi dengan pihak lokal dan internasional dalam bidang hak asasi manusia, kesehatan, dan kelompok-kelompok politik, serta bekerjasama untuk merubah konstitusional.
- d. Pengajuan tertulis kepada Joint Select Committee di Parlemen untuk memasukkan anti-

diskriminasi berdasarkan “orientasi seksual” didalam undang-undang.

- e. Mendokumentasikan dan menyediakan dokumen-dokumen untuk kasus-kasus berdasarkan diskriminasi seksual dan kekerasan di Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.
- f. Menyediakan arsip-arsip untuk penelitian akademis.

J-FLAG merupakan organisasi advokasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT dan menginginkan adanya toleransi dan menghormati sesama tanpa memandang orientasi seksual. Visi J-FLAG yaitu untuk mempromosikan perubahan sosial dengan memberdayakan komunitas LGBT dan membangun rasa toleransi serta penerimaan komunitas LGBT sebagai bagian dari masyarakat Jamaika. Misi dibentuknya J-FLAG yaitu menciptakan masyarakat Jamaika yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan mertabat semua individu terlepas dari orientasi seksual dan identitas gender mereka, Jamaika yang memiliki kebebasan untuk menjadi seseorang, untuk semua orang. J-FLAG mempromosikan nilai-nilai semua inklusivitas, keragaman, kesetaraan, keadilan, dan cinta.¹⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, J-FLAG memiliki 4 strategi yaitu: membuat *brand* J-FLAG yang kuat dan menjanjikan kepedulian sebuah organisasi yang berbasis nilai dedikasi untuk mempromosikan mertabat manusia dan hak-hak kebebasan, memperkuat kepemimpinan proaktif kelompok LGBT, bekerjasama dengan organisasi-organisasi HAM dan kelompok-kelompok kepentingan, dan membuat keunggulan dari budaya

¹⁴ [J-FLAG Celebrates Tenth Anniversary](http://www.ukblackout.com/news-mainmenu-84/caribbean-news/917-j-flag-celebrates-tenth-anniversary.html), diakses dari <http://www.ukblackout.com/news-mainmenu-84/caribbean-news/917-j-flag-celebrates-tenth-anniversary.html>

¹⁵ J-FLAG Annual Report 2013

kreatif dan menarik dari anggota-anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, J-FLAG memiliki 4 strategi yaitu: membuat *brand* J-FLAG yang kuat dan menjanjikan kepedulian sebuah organisasi yang berbasis nilai dedikasi untuk mempromosikan martabat manusia dan hak-hak kebebasan, memperkuat kepemimpinan proaktif kelompok LGBT, bekerjasama dengan organisasi-organisasi HAM dan kelompok-kelompok kepentingan, dan membuat keunggulan dari budaya kreatif dan menarik dari anggota-anggotanya.

3.4 Upaya dan Keberhasilan J-FLAG

3.4.1 We Are Jamaica

J-FLAG meluncurkan kampanye We Are Jamaica di media sosial (Youtube) untuk memungkinkan LGBT Jamaika dan lainnya untuk saling berbicara tentang identitas LGBT, masyarakat, dan hak-hak, serta diskriminasi dan kekerasan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah J-FLAG, ada kampanye yang dilakukan oleh beberapa LGBT secara terbuka untuk berbagi pengalaman pribadi mereka yang tinggal di Jamaika dan apa artinya menjadi seorang lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kampanye yang dihasilkan merupakan sumber harapan bagi LGBT, masyarakat, keluarga dan teman-teman mereka.

3.4.2 Tantangan untuk Undang-Undang Buggery

Belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjuangan LGBT di Jamaika, AIDS-Free World mengajukan gugatan menantang konstitusional hukum *Buggery* atas nama Javed Jaghai pada bulan Juni 2013. Javed merupakan seorang aktivis HAM terkenal, lulusan dari Universitas Dartmouth dan calon Phd di Universitas Yale. Ia bekerja

dengan J-FLAG sebagai *Education & Outreach Officer* saat gugatan itu diajukan.

Kasus tersebut telah mengumpulkan banyak dukungan dari masyarakat Jamaika dan juga LSM Jamaika. Selain J-FLAG bergabung sebagai *co-claimant* (penuntut) pada tanggal 3 September 2013, *Caribbean Dawn*, organisasi hak perempuan, juga bergabung sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, *Jamaicans for Justice* menolak untuk ikut bergabung. J-FLAG berupaya mencari koalisi yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan penuh dari mereka. Sidang tersebut rencananya dimulai pada bulan November 2014.

3.4.3 Pemerintah Mengambil Sikap Terhadap Hate Music/Pidato

Kementerian Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Jamaika menyatakan penyesalan respon terhadap suatu peristiwa yang melibatkan artis dalam acara *Independence Grand Gala* yang membuat pernyataan anti-gay. 20.000 orang termasuk anak-anak yang berada di stadion nasional Jamaika dan ribuan lainnya menonton di televisi dan online. Komitmen untuk meninjau keterlibatan sistem keterlibatan kontrak seniman dan pemasok event nasional serta meningkatkan kontrol kualitas untuk memastikan tidak ada kejadian seperti itu terulang lagi.

3.4.4 Kementerian Keamanan Nasional Riset di kalangan LGBT Jamaika

Kementerian Keamanan Nasional (*Ministry of National Security/MNS*) dan *Jamaica National Crime Victimization Survey (JNCVS)* menyertakan pertanyaan tentang kejahatan yang diyakini hasil dari asumsi atau pengetahuan tentang orientasi seksual seseorang. Lebih dari

150 orang LGBT dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dari seluruh negara diwawancarai oleh Kementerian dalam kemitraan dengan J-FLAG.

3.4.5 Kerjasama J-FLAG dan Pemerintah untuk Melatih Pekerja Kesehatan Masyarakat.

Antara September dan November 2013, J-FLAG dalam kerjasamanya dengan Program HIV Nasional (dari Dewan Keluarga Berencana Nasional) atau *National Family Planning Board (NFPB)* menggunakan pelatihan dasar sepuluh modul untuk membangun kapasitas enam puluh pekerja kesehatan masyarakat untuk memberikan layanan HIV untuk gay, biseksual dan lainnya.

3.4.6 Pendidikan Umum dan Peningkatan Kesadaran

Aktivis LGBT dan aktivis lainnya terus menciptakan dan memanfaatkan peluang Jamaika untuk belajar tentang hak asasi manusia, gender dan seksualitas.

3.4.7 Peningkatan Hubungan dengan Polisi

J-FLAG terus mendapatkan keuntungan dari hubungan kerja ditingkatkan dengan *Jamaica Constabulary Force (JCF)*, termasuk dan terutama dengan Kantor Komisaris Polisi, Pusat Investigasi Pelanggaran Seksual & Pelecehan Anak (*Centre for Investigation of Sexual Offences & Child Abuse/CISOCA*), dan petugas di pos polisi *Half Way Tree* dan pos polisi di New Kingston. Kelompok LGBT juga telah mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan untuk polisi dan di setiap divisi setidaknya satu sekutu dapat diidentifikasi yang bersedia dan mampu untuk menangani hal-hal mengenai seks dan minoritas gender. Hasilnya, telah terjadi peningkatan korban melaporkan ke

polisi mengenai insiden LGBT, yang telah didokumentasikan oleh J-FLAG.

3.5 Respon Internasional

Melalui presentasi-presentasi yang dilakukannya dalam memperjuangkan hak para homoseksual juga telah berhasil memperoleh dukungan dari banyak pihak. Aktivis-aktivis homoseksual telah berupaya agar pemerintah dan kepolisian untuk dapat menindak lanjuti kekerasan yang terjadi pada kelompok LGBT di Jamaika. Salah satu organisasi yang juga membantu perjuangan dan pelayanan bagi LGBT di Jamaica adalah ILGA-LAC (*International Lesbian, Gay Bisexual, Trans and Intersex Association for Latin America and Caribbean*).

ILGA-LAC bekerjasama dengan J-FLAG dalam membuat laporan dan kampanye untuk mendapatkan kesetaraan para homoseksual dengan heteroseksual dan juga mendapatkan hak-hak mereka tanpa memandang orientasi seksual mereka. Organisasi J-FLAG juga memperoleh dukungan dari ILGA (*International Lesbian and Gay Associations*) dan IGLHRC (*International Gays and Lesbian Human Right Community*).

Amnesti Internasional mendukung perjuangan J-FLAG. Hal ini dilihat dari dokumen yang dikeluarkan oleh Amnesti Internasional, yang menjelaskan penentangannya terhadap kekerasan yang diterima oleh para homoseksual tersebut, dan meminta kepada pemerintah Jamaika untuk mencegah dan memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap para homoseksual tersebut. *AIDS-Free World* mengajukan petisi dan mencari deklarasi dari Komisi yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan penegakan hukum oleh Jamaika dalam kaitannya dengan perilaku seksual konsensual swasta dengan laki-laki dewasa

melanggar kewajiban Jamaika di bawah hukum internasional, dan secara khusus berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 11 dan 26 dari konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.

Isyarat radikal dari penindasan dan penghapusan telah mendorong bentuk baru dari advokasi pada bagian dari aktivis lokal. Daripada fokus pada politik domestik, pelaku lokal kini mulai melihat melampaui negara terhadap potensi liberasionis dari lingkup internasional. Secara khusus, aktivis telah berpaling ke hukum internasional sebagai forum atas penegakan dan pembenaran dari status yang sama sebagai warga negara.

3.6 Respon Pemerintah

Sebelum pemilihannya pada tahun 2011, Perdana Menteri Portia Simpson Miller menyerukan legislatif untuk meninjau kembali undang-undang *buggery* Jamaika, yang mengkriminalisasikan perilaku sesama jenis antara laki-laki tersebut. di tahun 2013, ia menunjukkan bahwa ia akan melakukan pemungutan suara parlemen mengenai hukum *buggery*. Namun, pada tanggal 4 April 2014, dia menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa membatalkan hukum harus didasarkan pada kehendak konstituen dan pencabutan hukum tersebut bukan prioritas pemerintahan karena tidak menyangkut mayoritas masyarakat Jamaika.¹⁶ Opini publik tampaknya mengakar kuat terhadap reformasi hukum yang akan menegakkan hak kelompok LGBT tersebut, jajak pendapat menunjukkan bahwa persepsi pemerintah akan berdampak negatif jika hukum *buggery* ditinjau atau diubah.

Beberapa departemen pemerintah telah konstruktif dalam

tindakan dan respon mereka terhadap Hak LGBT, meskipun ini sering tidak konsisten, dan akan menjadi ruang untuk perbaikan ketika datang reformasi hukum dan memastikan non-diskriminasi dan akses yang sama ke pelayanan sosial, termasuk kesehatan dan pendidikan terhadap LGBT. Menteri Kehakiman Mark Golding telah mengeluarkan respon verbal positif lebih kuat untuk perlindungan hukum dan legislatif hak-hak orang LGBT Jamaika, tapi pernyataannya belum diimbangi dengan tindakan signifikan. Pada Januari 2013, dalam menanggapi laporan IACHR tentang hak asasi manusia di Jamaika, yang termasuk pelanggaran terhadap orang-orang LGBT di Jamaika, Menteri Golding mengisyaratkan bahwa legislatif intervensi mungkin diperlukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, tapi di tahun berikutnya pernyataan ini, ia belum memperkenalkan anti diskriminasi yang komprehensif.

BAB IV

HAMBATAN DAN TANTANGAN JAMAICA FORUM FOR LESBIANS, ALL SEXUALS, AND GAYS (J- FLAG) DALAM MELAWAN HOMOPHOBIA

4.1 Hambatan dan Tantangan J- FLAG dalam Melawan Homophobia

4.1.1 Legitimasi Negara

a. Adanya Hukum *The Offences Against the Person Act (OAPA)*

Permasalahan banyaknya korban pembunuhan dengan latar belakang diskriminasi terhadap kaum homoseksual di Jamaika disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor hukum. Jamaika memiliki undang-undang anti-sodomi yang disebutkan dalam pasal 76, 77, dan 79:

¹⁶

<http://www.pinknews.co.uk/2014/05/19/lawyer-jamaican-prime-minister-has-betrayed-gay-voters-by-refusing-to-lift-buggery-law/>

Article 76 Unnatural Offences:

Whosoever shall be convicted of the abominable crime of buggery, committed either with mankind or with any animal, shall be liable to be imprisoned and kept to hard labour for a term not exceeding ten years.

[Barangsiapa akan dihukum jika melakukan kejahatan keji dari buggery baik melakukannya dengan manusia atau binatang akan dihukum dan kerja paksa kurang lebih 10 tahun]

Article 77:

Whosoever shall attempt to commit the said abominable crime, or shall be guilty of any assault with intent to commit the same, or of any indecent assault upon any male person, shall be guilty of a misdemeanour, and being convicted thereof, shall be liable to be imprisoned for a term not exceeding seven years, with or without hard labour.

[Barangsiapa yang mencoba melakukan kejahatan keji tersebut, bersalah atas penyerangan untuk melakukan hal yang sama, atau serangan yang tidak senonoh terhadap laki-laki dinyatakan bersalah untuk tindak pidana ringan, akan dihukum penjara kurang lebih 7 tahun, dengan atau tanpa kerja paksa]

Article 79 Outrages on Decency:

Any male person who, in public or private, commits, or is a party to the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be guilty of a misdemeanour, and being convicted thereof shall be liable at the discretion of the court to be imprisoned for a term not exceeding two years, with or without hard labour.

[Setiap laki-laki di depan umum maupun pribadi, melakukan atau merupakan pihak yang berbuat, atau pengadaan, atau mencoba untuk mendapatkan komisi oleh setiap laki-laki, setiap tindakan yang tidak senonoh dengan laki-laki, dinyatakan bersalah dan dihukum penjara untuk jangka waktu kurang lebih 2 tahun, dengan atau tanpa kerja paksa.]

4.1.2 Keadaan Sosial Masyarakat yang a. Homophobia yang Berlebihan

Homophobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap kelompok homoseksual bukan saja dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum yang menentang keberadaan kelompok homoseksual ini, tetapi terdapat pula pengaruh pola pikir yang salah, yang telah melekat dalam setiap *mind set* individu yang ada di masyarakat Jamaika tersebut.

Menurut Dr. Heather Royes, salah satu pendukung JAS dan J-FLAG menjelaskan bahwa masalah ini berasal dari penyangkalan dari sifat dasar manusia dan tentang politik seksual Jamaika itu sendiri. Secara historis, Jamaika adalah masyarakat perkebunan dan ada jenis hubungan seksual dan antar ras yang terjadi, antara pemilik dan budak, pria dan wanita, dan tentu saja diantara jenis kelamin yang sama. Namun, hal itu ditolak dan tentu saja sesuatu yang ditolak akan membuat masyarakat ragu-ragu dan merasa tidak aman. Hal tersebut telah menjadi salah satu penyebab maraknya kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual karena dianggap sebagai ancaman untuk citra macho atau maskulinitas yang dimiliki oleh pria. Banyak pria Jamaika merasa bahwa memiliki banyak istri atau pacar merupakan ukuran dari

maskulinitas. Masyarakat Jamaika biasa mengalami kebingungan tentang homoseksualitas dan mereka tidak mempunyai siapapun untuk bertanya dan tidak punya ide bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu hal yang tidak mereka mengerti. Mereka bereaksi dengan apa yang disebut ‘ketidaksesuaian kognitif’, tidak ada tempat bagi pikiran mereka untuk menaruh sesuatu yang aneh dan buruk tersebut. Mereka tidak mengerti akan hal-hal yang mereka anggap tabu, dan jika mereka tidak paham, mereka menjadi takut maka mereka menyerang dan berusaha untuk menghancurkannya.

b. Pendidikan yang Rendah

Jamaika memiliki reputasi buruk terhadap prasangka anti-gay. Pulau kecil di Karibia ini telah menjadi terkenal tidak hanya untuk undang-undang anti-gay, retorika politik dan pembunuhan, tetapi juga penerimaan masyarakat luas mengenai prasangka seksual yang parah dan musik secara terbuka membenci kelompok homoseksual. Pengetahuan yang kurang mengenai homoseksualitas memberikan dampak yang negatif, karena bagi mereka hubungan yang alami dan dapat diterima oleh akal adalah hubungan heteroseksual.

4.1.3 Religion (Agama)

Agama Kristen Protestan khususnya memiliki pengaruh kuat di Jamaika. Politisi sering menggambarkan negara sebagai “negara Kristen” dan masyarakat Jamaika sebagai “orang yang takut akan Tuhan”. Beberapa orang Kristen menggabungkan retorika agama dengan homofobia. Mayoritas masyarakat Jamaika adalah Rastafarian. Sebuah agama dengan keyakinan politik yang mendalam, gerakan Rastafari mulai di daerah kumuh Jamaika pada tahun 1920 dan 30-an. Tradisi keagamaan Afrika telah banyak dipengaruhi budaya Rastafarianism dan

tema alkitabiah telah sangat dipengaruhi sistem keyakinan agama. Rastafarian percaya pada Tuhan Yahudi-Kristen, yang mereka sebut Jah. Secara umum, keyakinan Rastafarian yang berbasis di agama Yahudi dan Kristen, dengan penekanan pada hukum Perjanjian Lama dan nubuat dan Kitab Wahyu

4.1.4 Budaya

Homoseksual di Jamaika dianggap sebagai imperialisme budaya yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Perbudakan ditargetkan sebagai titik dimana homoseksualitas diperkenalkan kepada orang-orang keturunan Afrika. Hindia Barat dan anggota gerakan Pan-Afrika, mencatat bahwa seseorang tidak dapat menyangkal sejarah masyarakat perkebunan dan dampaknya, peran seksual yang dimainkan dari berbagai bentuk eksploitasi seksual yang terjadi seperti homoseksualitas sangat sensitif di Jamaika.¹⁷

4.1.5 Funding dan Networking

Kondisi keuangan J-FLAG menjadi salah satu tantangan yang harus mereka hadapi dan menjadi hambatan mereka dalam memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT. Selama ini keuangan J-FLAG berasal dari donasi-donasi yang dikirimkan oleh orang-orang yang peduli tentang HAM. Hal tersebut tentu tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan dasar mereka. Sedangkan, isu homoseksual ini bukanlah merupakan isu komersial yang dapat dengan mudah menjadi perhatian bagi masyarakat dan juga didukung, terutama masyarakat domestik Jamaika itu sendiri.

4.2 Peluang

Dengan hadirnya J-FLAG sebagai organisasi yang melayani, melindungi dan memperjuangkan hak-

¹⁷ Jamilah King. Outing the Center: Homophobia in Jamaica. DigitalCollections@SIT. 2006, hal 22

hak kelompok minoritas seksual ini, memberikan peluang bagi mereka untuk dapat menjadi dirinya sendiri tanpa takut akan kekerasan ataupun diskriminasi yang mereka hadapi. Prestasi J-FLAG di tahun 2013 menunjukkan bahwa J-FLAG telah mendapat respon baik dari berbagai kalangan. Akan tetapi, dalam hal ini J-FLAG membutuhkan langkah taktis dan strategis untuk memperbesar peluang dan memperkecil tantangan dalam melawan homophobia di Jamaika. Beberapa peluang yang dapat direbut oleh J-FLAG dalam melawan homophobia di Jamaika, yaitu:

Pertama, keberhasilan misi dalam upaya untuk meningkatkan akan pengetahuan mengenai LGBT melalui seminar-seminar dapat memberikan peluang bagi masyarakat dalam memahami persamaan hak tanpa memandang orientasi seksual mereka. Sehingga membentuk stigma yang positif terhadap LGBT.

Kedua, keanggotaan J-FLAG di ILGA dapat memperkuat kerjasama J-FLAG dengan organisasi-organisasi nasional dan organisasi-organisasi internasional dalam memperjuangkan hak-hak LGBT serta dalam melawan homophobia di Jamaika.

Ketiga, keberhasilan yang telah dicapai memberikan peluang bagi kaum homoseksual untuk dapat membuka identitas seksualnya tanpa takut akan ancaman dan diskriminasi yang ditujukan padanya.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Meskipun undang-undang buggery di Jamaika berasal dari masa lalu kolonial, namun keberadaannya telah membawa dampak bagi kelompok homoseksual. Dasar-dasar dari budaya homophobia yang menginfeksi Jamaika adalah sisa-sisa dari sistem dominasi

kolonial dan asimilasi budaya yang dipaksa. Peran kolonial meningkatkan stigma tentang jalinan ras, jenis kelamin, gender dan kelas yang membuat keterikatan yang rumit. *Mind set* yang telah ditanamkan pada masa kolonial menjadi akar permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual.

Hukum diskriminatif dan kurangnya perlindungan khusus terus berkontribusi pada timbulnya diskriminasi, kekerasan dan bentuk-bentuk lain kekerasan terhadap orang-orang LGBT. Masalah diskriminasi homoseksual yang terjadi di Jamaika diakibatkan oleh banyak faktor, baik internal ataupun eksternal, namun faktor utama ialah homophobia yang berlebihan yang telah terkonstruksi dalam pikiran masyarakat Jamaika. J-FLAG sebagai organisasi pertama yang menyuarakan hak-hak kelompok LGBT di Jamaika. Perjalanan J-FLAG dalam mencapai tujuan tidaklah mudah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh J-FLAG agar masyarakat dapat menerima dan menghormati kelompok LGBT sebagai bagian dari masyarakat.

5.2 Saran

1. Untuk mencapai visi dan misi J-FLAG dalam menghadapi homophobia masyarakat Jamaika, maka perlu lebih banyak melakukan promosi dan pengetahuan mereka mengenai homoseksual, agar kaum LGBT dapat kesempatan untuk mempublikasikan dirinya tanpa adanya tekanan maupun diskriminasi dari masyarakat.
2. Untuk menghadapi tantangan legitimasi negara, J-FLAG perlu memperluas akses dan jaringan kerjasama dari berbagai organisasi lain, serta demi tercapainya harmonisasi antara J-FLAG dan pemerintah perlu

adanya upaya peningkatan komunikasi, koordinasi dan pemahaman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

Daftar Pustaka

Boxill, Ian, - Dkk. 2011. *National Survey Of Attitudes And Perceptions Of Jamaicans Towards Same Sex Relationships*. Department Of Sociology, Psychology And Social Work

Collin Spencer. 2011. *Sejarah Homoseksualitas: dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Bantul: Kreasi Wacana

Gaskins Jr, Joseph. 2013. *Buggery' and the Commonwealth Caribbean: a comparative examination of the Bahamas, Jamaica, and Trinidad and Tobago*. London: School of Advanced Study, University of London

Human Right Watch. 2014. *Not Safe at Home: Violence and Discrimination against LGBT People in Jamaica*. USA: Human Right Watch

- 2008. *The Origins of "Sodomy" Laws in British Colonialism*. USA. Human Right Watch

ILGA. 2014. *State-Sponsored Homophobia Edisi 9*. ILGA

J-FLAG. 2014. *Jamaican LGBT Guide on Human Rights, Sexuality & Gender*. Kingston: J-FLAG

- 2013. *Promoting Respect for Diversity: Annual Report 2013*. Kingston: J-FLAG

Anonim. *Tantangan dan Hambatan J-FLAG dalam Mengurangi Tingkat Diskriminasi Terhadap Gay di Jamaika*. diakses dari

<<https://www.google.co.id/url?sa=t&rc=t&j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca=d=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=ht>

tp%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F20920762%2F433518185%2Fname%2Fmakalahmastran-tanpapenutup.doc&ei=o8FoVOOYH8Os_uQTswlGICg&usg=AFQjCNFoAEeq9i-3QO_4QfolMtdgvPzn7g> pada tanggal 18 Agustus 2014

Bray, Alan. 1990. *Homosexuality and the Signs of Male Friendship in Elizabethan England*. Diakses dari <<http://www.jstor.org/stable/4288956>>

tanggal 20 Juli 2015 pukul 20:00 WIB

Charles, Christopher A.D. 2011. *Representations of Homosexuality in Jamaica*. Social and Economic Studies Kirby, Michael. 2011. *The sodomy offence: England's least lovely criminal law*

export?. Journal of Commonwealth Criminal Law

Rahardjo, Wahyu. 2007. *Homophobia dan Penolakan Masyarakat Serta Hubungannya dengan Bicultural Identity Pada Covert Homoseksual*. Jurnal Penelitian Psikologi Universitas Gunadharma

Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review.

Diakses dari <http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/JM/AI_AmnestyInternational.pdf> pada tanggal 05

Agustus 2014

Declaration of Montreal diakses dari <<http://www.declarationofmontreal.org/declaration/>> pada tanggal 05 Agustus 2014

Diana Taylor. 'If you're gay in Jamaica, you're dead'. Diakses dari

<<http://www.theguardian.com/world/2004/aug/02/gayrights.gender>> pada tanggal 05 Agustus 2014

Human Rights First. *LGBT Issues In Jamaica* diakses dari ≤

<http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Jamaica-LGBT-Fact->